



## Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*)

Meyland S.F. Wambrauw\* | Mathius Apintamon

### INSTITUSI/ AFILIASI

Program Studi Hubungan Internasional,  
Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura,  
Papua, Indonesia.

### KORESPONDENSI

\* Meyland S.F. Wambrauw, Jalan Kamp  
Walker Waena, Universitas Cenderawasih,  
Kota Jayapura, Papua 99351, Indonesia.  
Email: [wmeylland@yahoo.com](mailto:wmeylland@yahoo.com)

### ABSTRACT

This study examines why the United States (US) imposes economic sanctions against Iran during the Covid-19 pandemic and the impacts on the ongoing tensions between the two countries. By adopting qualitative descriptive analysis, the study found that the US enforced a series of economic sanctions on Iran because it was considered a threat to US economic and strategic interests in the region. Not only did the US apply sanctions on foreign-affiliated companies assisting Iranian people's health services due to the indication of financing of terrorism, but the US also blacklisted several Iranian officials for human rights violations. The US even convinced the IMF not to provide 'emergency loan funds' to Iran. As a consequence, Iran found it difficult to get access to medicines and medical equipment which was fundamentally important to fight the outbreak of the Covid-19. Iran previously struggled with US economic sanctions, and the further sanctions during the Covid-19 had exacerbated the country's situation. It is also worth noting that the US, in this context, ignored the aspect of human life in Iran because of its sanctions during the Covid-19 pandemic.

### KEYWORDS

Covid-19; Iran; Sanctions; United States

## PENDAHULUAN

Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang sangat dinamis. Gejolak politik maupun keamanan di Timur Tengah tidak terlepas dari interaksi antara negara-negara di dalam dan dari luar kawasan tersebut, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia kedua. Tidak hanya negara-negara di kawasan yang berambisi untuk memenangkan pertarungan pengaruh, politik, ideologi, dan militer, tetapi negara luar kawasan serta adidaya saat itu seperti Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) juga campur tangan dalam interaksi kawasan (Setiawan, 2018). Hal ini tentu berkaitan erat dengan kepentingan nasional negara-negara Barat yang tertuju pada sektor energi (minyak dan gas) di kawasan Timur Tengah.

Sebagai negara adidaya, AS memiliki kekuatan dan pengaruh ekonomi yang luar biasa. Ini memberikan AS keleluasaan untuk mempraktikkan kapitalisme di seluruh penjuru dunia. AS memanfaatkan statusnya sebagai *super power* untuk mengatur arah kepentingan nasionalnya di Timur Tengah. Sejak revolusi Islam di Iran pada 1979, hubungan diplomatik AS-Iran terputus hingga saat ini. Dalam pandangan yang sederhana, AS menganggap Iran sebagai ancaman paling berbahaya bagi perdamaian dunia (Chomsky, 2016). Berbagai sanksi ekonomi yang berat dan merusak pun dijatuhkan AS dengan maksud untuk mewujudkan perubahan rezim di Iran. Di sisi lain, Iran memberikan respons konfrontatif yang

sifatnya mengancam kepentingan strategis dan ekonomi AS di Timur Tengah. Hal ini kemudian menciptakan sebuah rivalitas berkepanjangan antar-kedua negara.

AS di bawah kepemimpinan George W. Bush dan Iran di bawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad merupakan era paling buruk sepanjang rivalitas kedua negara. Kedua Presiden merupakan tokoh yang keras dan sangat kritis terhadap satu sama lain. Namun semua itu berubah ketika kedua negara dipimpin oleh tokoh yang lebih moderat. Di bawah kepemimpinan Barrack Obama dan Hassan Rouhani, hubungan AS-Iran mulai menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Ini ditandai dengan disepakatinya kesepakatan nuklir Iran – *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) – yang sempat dinegosiasikan selama hampir satu dekade.

JCPOA merupakan sebuah kesepakatan multilateral antara Iran dengan anggota tetap dewan keamanan PBB dan Jerman (P5+1). Lima hal pokok yang diatur dalam JCPOA adalah level pengayaan uranium, kapasitas pengayaan, stok uranium, stok plutonium, dan pengawasan (Riza, 2019). Sebagai kompensasi terhadap ketaatan Iran pada kesepakatan itu, partisipan lainnya terutama AS sepakat untuk mencabut sebagian besar sanksi ekonomi terhadap Iran. Namun pada 8 Mei 2018, Presiden Donald Trump menghentikan pencabutan sanksi sebagaimana ditentukan dalam JCPOA dan mengumumkan

keputusannya untuk keluar dari kesepakatan itu (Fitzpatrick et al., 2019).

Kemunduran sepihak AS dari kesepakatan multilateral itu berakibat pada serangkaian peristiwa yang meningkatkan ketegangan dengan Iran. Peningkatan tensi diawali dengan penyerangan kapal tanker di Teluk Oman pada Mei dan Juni 2019. AS menuduh Iran sebagai dalang penyerangan ini (CNN Indonesia, 2019). Selanjutnya Iran menembak jatuh *drone* milik AS yang memasuki wilayah kedaulatannya pada Juni 2019 (Cooper, 2019). AS yang gusar terhadap tindakan tersebut kemudian memperketat sanksi ekonominya terhadap Iran.

Konflik mencapai titik terpanasnya pada 3 Januari 2020 ketika AS meluncurkan serangan udara yang menewaskan Komandan Tertinggi Iran, Qassem Soleimani. Ketika stimulus perang antar-kedua negara telah sangat tinggi, dunia seakan dijeda oleh pandemi Covid-19. Pada masa awal penyebarannya, Iran merupakan negara yang paling terdampak pandemi tersebut. Per Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi di Iran melebihi 32.000 orang. Ini puluhan kali lipat lebih tinggi daripada tetangganya di kawasan. Israel berada di posisi kedua dengan 3.035 kasus, diikuti Oman (1.292 kasus) dan Arab Saudi (1.104 kasus) (Statista, 2020). Kondisi ini tentu akan membuat sanksi ekonomi AS semakin memberatkan Iran dalam melewati masa pandemi Covid-19.

Sama halnya dengan negara-negara lain di dunia, Iran juga merespons

peningkatan kasus tersebut dengan memberlakukan *lockdown* yang sangat melumpuhkan perekonomian Iran. Di saat yang bersamaan, AS secara unilateral semakin memperketat sanksi ekonominya, dan tindakan ini hampir mendorong Iran ke arah *total economic lockdown* (Takian, 2020). AS memanfaatkan momen ini untuk melancarkan sejumlah sanksi ekonomi yang sangat berhubungan erat dengan pandemi Covid-19. Diantaranya adalah pemberlakuan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan asing yang melakukan bisnis dengan Iran. Hal ini tentunya mempersulit Iran dalam membeli peralatan medis, farmasi, dan laboratorium yang sangat vital dalam membantu Iran memerangi pandemi Covid-19.

Kebijakan luar negeri AS terhadap Iran ini menuai banyak kecaman internasional bahkan domestik. Aktivis yang berbasis di AS telah meluncurkan kampanye digital untuk memprotes sanksi menggunakan tagar #EndCOVIDSanctions di *Twitter* dan *Instagram*. Komunitas Iran-Amerika juga telah memposting video-video yang menggambarkan bagaimana sanksi berdampak pada keluarga mereka di Iran yang memerangi pecahnya virus korona yang mematikan.

Belasan akademisi terkemuka di AS dan Kanada, seperti Noam Chomsky, telah menandatangani petisi yang menyarankan bahwa sanksi terhadap Iran di masa krisis global ini adalah tindakan tidak adil dan melanggar hak mereka

untuk perlindungan kesehatan dan mendapatkan akses ke perawatan medis. Demikian pula, mantan Wapres AS, Joe Biden, yang juga menjadi kandidat dalam pemilu presiden AS November 2020; Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet; Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, Perdana Menteri Pakistan, dan tokoh-tokoh lainnya menyerukan pelanggaran sanksi terhadap Iran (N. Mortazavi, 2020).

Merespons sanksi tersebut Iran juga mengambil serangkaian tindakan diplomatik. Salah satunya adalah upaya Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif yang menyurati Sekjen PBB, Antonio Guterres. Zarif mengadukan sanksi AS sebagai tantangan terbesar bagi Republik Islam dalam perang melawan virus korona dan mendesak agar sanksi unilateral dan ilegal itu segera diakhiri (Tasnim News Agency, 2020). Fenomena inilah yang membuat tim penulis tertarik untuk mengkaji isu ini lebih lanjut.

Artikel ini bertujuan untuk menelaah lebih dalam terkait motif pemberian sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pandemi Covid-19, dan dampaknya terhadap ketegangan kedua negara yang sedang berlangsung. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, penulis memaparkan teori realis sebagai pendekatan dalam menganalisa tulisan ini. Kedua, penjabaran terkait metode penelitian yang digunakan. Ketiga, bagian pembahasan yang terdiri dari tiga sub-

bagian; dan bagian terakhir adalah kesimpulan.

## TINJAUAN LITERATUR

Tulisan ini menggunakan teori realisme dalam hubungan internasional untuk menjelaskan perilaku Amerika Serikat dalam menerapkan sanksi ekonomi terhadap Iran di tengah pandemi Covid-19. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional atau *national interest* merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis.

Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menegaskan bahwa kepentingan setiap negara dalam hubungan internasional adalah mengejar kekuatan/kekuasaan (*struggle for power*). Morgenthau sendiri mendefinisikan *power* sebagai apa saja yang menjadikan dan mempertahankan kendali suatu negara terhadap negara lain (Bakry, 2017).

Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama. Dalam hal ini, AS melihat bahwa satu-satunya cara untuk mengeliminasi ancaman Iran terhadap kepentingannya adalah dengan menundukkan rezim negara itu yang dianggap sebagai '*rogue state*'. Dalam hal ini, AS tidak memanfaatkan kekuatannya militernya, melainkan kekuatannya ekonominya. AS

melancarkan tekanan ekonominya terhadap Iran pada masa pandemi Covid-19, dengan dalih untuk melindungi kepentingan nasionalnya, yang pada akhirnya akan menjamin keberlangsungan negaranya.

#### **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran pada masa pandemi Covid-19. Deskripsi kualitatif adalah penelitian eksplorasi dan berperan penting dalam menghasilkan hipotesis atau pemahaman dalam berbagai variabel sosial (Bungin, 2009). Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai dalam tulisan ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan data-data sekunder yang sumbernya diperoleh dari buku-buku, situs-situs internet, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber terkait lainnya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Dinamika Hubungan AS dan Iran: Sanksi Ekonomi Dari Satu Pemerintahan AS ke Pemerintahan Lainnya**

Kepentingan AS di Timur Tengah memiliki hubungan langsung dengan perilaku AS terhadap Iran. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran sejatinya merupakan sebuah wujud kebijakan luar negeri negara tersebut. Secara umum kebijakan luar negeri biasanya melibatkan cita-cita. Dalam artian bahwa di balik tekanan

ekonomi yang dilancarkan AS, ada beberapa hal yang hendak dicapai.

Sanksi ekonomi AS bukanlah hal yang baru bagi Iran. Sejarahnya dapat ditelusuri sejak kemenangan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Revolusi Islam diwarnai dengan pengepungan kantor kedutaan besar AS di Tehran. Peristiwa yang paling mengundang kecaman baik publik maupun pemerintah AS pada periode ini adalah krisis sandera. Saat terjadi revolusi Iran, hubungan Amerika-Iran tidak hanya memburuk tetapi kemungkinan untuk memperbaiki hubungan itu juga ikut hilang dikarenakan tidak efektifnya negosiasi antar kedua negara. Tokoh revolusi Iran Ayatullah Khomeini menjuluki Amerika sebagai 'setan besar'; sementara Presiden Carter menyebut para Mullah sebagai 'sekumpulan orang gila' (Gerges, 2002).

Pemerintahan Presiden Carter kala itu benar-benar kewalahan dalam menghadapi Iran yang menawan para diplomatnya di Tehran selama 444 hari. Hal ini yang menjadi cikal bakal kebencian para petinggi negara maupun publik AS terhadap Iran dan kemudian terhadap Islam. Pada masa itu Presiden Carter melihat sanksi ekonomi sebagai suatu cara tercepat untuk menundukkan Iran dan menegosiasikan kepulauan warga mereka yang ditahan. Di sini polanya jelas bahwa kebijakan Carter itu melibatkan cita-cita yang hendak dicapai yaitu menekan Iran dan membebaskan warga AS yang disandera di Tehran. Sanksi lanjutan pada tahun-tahun berikut menunjukkan pola yang kurang lebih

sama meski motifnya cenderung berkembang.

Patrick Clawson adalah seorang direktur penelitian pada *Washington Institute of Near East Policy*. Dalam sebuah artikel, Clawson (2010) membagi periodisasi sanksi AS terhadap Iran ke dalam 5 ronde besar (*five major rounds*). Kelima ronde tersebut dijalankan dalam 5

pemerintahan AS yang berbeda dan juga merupakan respons terhadap tindakan Iran itu sendiri. Penjelasan kelima ronde tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Namun, penjelasan Clawson hanya sampai pada pemerintahan Obama, sehingga penulis akan melengkapi periodisasi tersebut hingga Pemerintahan Trump.

Tabel 1. Periodisasi Sanksi AS terhadap Iran

Periode	Sanksi	Tujuan
Pemerintahan Carter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemblokiran impor minyak Iran;</li> <li>• Pembekuan aset Iran senilai 12 Trilyun USD di AS;</li> <li>• Embargo ekonomi dan perjalanan antara AS dengan Iran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan Iran untuk membebaskan 444 Warga AS yang ditawan di Tehran.</li> </ul>
Pemerintahan Reagan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menentang upaya pinjaman dana Iran di Bank Dunia;</li> <li>• Membatasi ekspor barang (berfungsi ganda/yang dapat dialihgunakan untuk keperluan militer) ke Iran;</li> <li>• Pemblokiran impor minyak AS dari Iran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membalas pengeboman terhadap pasukan penjaga keamanan AS di Libanon.</li> <li>• Menekan upaya perang Iran selama perang Iran-Irak.</li> <li>• Menekan ketergantungan AS terhadap impor minyak dari Iran sebagai sumber cadangan minyak strategisnya.</li> </ul>
Pemerintahan Clinton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelarangan keterlibatan AS dalam pengembangan minyak Iran; Dua bulan kemudian AS embargo total terhadap investasi dan perdagangan ke Iran.</li> <li>• Kongress meloloskan <i>Iran and Libya Sanctions Act (ILSA)</i> untuk melarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan pertumbuhan industri migas Iran yang adalah sumber pendapatan utama rezim itu.</li> </ul>

	perusahaan asing berinvestasi pada industri minyak dan gas Iran.	
Pemerintahan Bush	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerbitan serangkaian perintah untuk membekukan aset perusahaan dan individu tertentu yang dianggap terlibat dalam dukungan Iran terhadap terorisme dan peran Iran dalam mengacaukan kestabilan keamanan di Irak;</li> <li>• Penerbitan <i>Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act</i>;</li> <li>• Pendirian kantor khusus di bawah Kementerian Keuangan AS yang bertujuan untuk memperketat sanksi terutama terhadap Iran;</li> <li>• Penjatuhan sanksi terhadap beberapa entitas asing, terutama perusahaan Tiongkok dan Rusia yang membantu pengembangan program nuklir dan rudal Iran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menekan dukungan Iran terhadap 'kelompok teroris';</li> <li>• Mencegah Iran dalam menyulut ketidakstabilan di Iran maupun kawasan;</li> <li>• Menghambat pengembangan program nuklir Iran dan mencegah Iran dalam memperoleh senjata nuklir.</li> </ul>
Pemerintahan Obama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperketat sanksi dari Pemerintahan Bush; Banyak institusi maupun individu dikenai sanksi dengan alasan pelanggaran HAM, hingga perdagangan narkoba, dan proliferasi;</li> <li>• Anak perusahaan AS dari bank asing telah membayar lebih dari \$14 miliar denda untuk pelanggaran peraturan sanksi, sebagian besar terkait dengan transaksi dengan Iran;</li> <li>• Penerbitan <i>Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act (CISADA)</i> untuk menargetkan produk minyak olahan yang diimpor oleh Iran melalui perusahaan non-AS;</li> <li>• <i>The Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act</i>; menargetkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah Iran untuk bangkit sebagai kekuatan dominan (hegemoni) di kawasan;</li> <li>• Menekan Iran untuk melunak dalam negosiasi terkait program nuklirnya;</li> </ul>

	<p>asuransi dan transportasi minyak Iran;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi 1245 dalam <i>National Defense Authorization Act</i>; membatasi bank asing yang bertransaksi dengan Bank Sentral Iran.</li> <li>• <i>The Iran Freedom and Counter-Proliferation Act</i> diterbitkan untuk memperluas jangkauan sanksi terhadap perusahaan asing yang bertransaksi atau menyediakan transportasi terhadap industri minyak dan otomotif, maupun juga logam mulia.</li> <li>• Pada November 2013 Presiden Obama menanggukkan sebagian sanksi sehubungan dengan dicapainya kesepakatan sementara dengan Iran terkait Isu Nuklir.</li> </ul>	
<p>Pemerintahan Trump</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Uni Emirat Arab karena membeli produk minyak dari Perusahaan Minyak Nasional Iran atau <i>National Iranian Oil Company</i> (Middle East Eye, 2020).</li> <li>• Kemenkeu AS juga mengumumkan sejumlah petinggi negara Iran dengan tuduhan pelanggaran HAM (Macias, 2020).</li> <li>• AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Irak dan Iran yang disinyalir bekerja sama atau merepresentasikan <i>IRGC Quds Force</i><sup>1</sup> (Middle East Eye, 2020).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah kemungkinan perusahaan-perusahaan asing tersebut untuk membiayai proksi teroris seperti <i>IRGC Quds Force</i>.</li> <li>• Memberi "tekanan maksimum" pemerintahan Trump terhadap Teheran.</li> <li>• Mengurangi peran aktor-aktor lain dalam memfasilitasi penjualan minyak</li> </ul>

<sup>1</sup> *The Quds Force* atau Pasukan Quds dianggap sebagai Organisasi Teroris Asing (*Foreign Terrorist Organization*) oleh Amerika Serikat pada April 2019. Lihat: <https://www.foxnews.com/world/what-is-the-quds-force-the-elite-iranian-military-unit>

		Iran.
--	--	-------

Sumber: Diolah dari 'U.S. Sanctions on Iran' (Clawson, 2010)

Dari tabel diatas, dapat dilihat bagaimana AS selalu memberikan sanksi terhadap Iran yang dianggapnya sebagai ancaman – mulai dari pemerintahan Carter hingga Trump di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Namun, pemerintahan AS yang baru dibawah kepemimpinan Joe Biden yang demokrat, mungkin saja akan lebih melunak dalam memberikan sanksi ekonomi kepada Iran. Hal ini didasari dengan argument bahwa Biden memberikan prioritas dalam memperbaiki citra AS dimata global setelah kepemimpinan Trump yang sebelumnya dianggap memperburuk. Joe Biden bahkan menyatakan sikap untuk bergabung lagi dalam perjanjian internasional yang telah ditinggalkan Trump sebelumnya, termasuk kesepakatan yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran sebagai imbalan menurunkan program nuklirnya. Biden mengatakan bahwa jika Iran kembali ke kepatuhan ketat maka dia akan menggabungkan AS kembali dengan perjanjian nuklir (Usher, 2020).

Dalam teori realisme, keamanan nasional atau internasional berada pada prioritas utama. Selama Iran masih menjadi ancaman bagi AS, maka sanksi ekonomi pun akan terus diberikan. Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa keamanan nasional maupun internasional masih menjadi dalih utama AS dalam menekan Iran. Sebutlah AS menganggap

program nuklir Iran sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan dan keberlangsungan nasionalnya maupun internasional. Hal inilah yang mendorong AS untuk melancarkan serangan ekonomi kepada Iran untuk mencegah negara tersebut memiliki senjata nuklir.

Sanksi-sanksi AS tersebut dapat dikatakan sebagai sanksi yang sangat merusak perekonomian Iran. Hal ini mengingat sebagian besar sanksi ekonomi AS tersebut ditujukan pada sektor perdagangan minyak Iran. Menurut data dari Bank Sentral Iran, minyak mendominasi 2/3 dari total ekspor negara itu. Sektor ini sangat berarti bagi perekonomian rezim tersebut. Itu sebabnya, pemberlakuan kembali sanksi ekonomi oleh AS tidak hanya akan merusak perekonomian Iran namun juga mendesak Iran untuk memberikan tindakan represif, yang berpotensi meningkatkan ketegangan antar keduanya.

Dalam rentang waktu antara Mei 2019 hingga Januari 2020 terjadi beberapa insiden yang justru meningkatkan ketegangan antara AS dengan Iran. Pertikaian tersebut pada akhirnya memengaruhi arah kebijakan luar negeri kedua negara, terutama AS yang sejak awal telah bersikap agresif melalui sanksi ekonominya. AS tidak segan-segan memperluas jangkauan sanksi ekonominya kepada setiap aktor non-negara yang diasumsikan telah membantu

Iran dalam menghadapi sanksi ekonominya. Hal ini membuktikan bahwa AS sebagai negara masih merupakan aktor dominan, kesatuan, dan memiliki andil besar dalam tatanan internasional.

### **Iran sebagai Ancaman Keamanan Nasional dan Internasional terhadap AS**

Ada beberapa ancaman yang diberikan Iran terhadap AS. Pertama, ancaman ekonomi, atau ancaman yang ditujukan terhadap kepentingan ekonomi AS di kawasan. Kepentingan ekonomi AS di kawasan Timur Tengah adalah mengamankan rute perdagangan minyak di Teluk Persia. AS tentu menganggap Iran berpotensi sebagai ancaman terhadap kepentingan tersebut karena Iran memiliki kedaulatan pada wilayah Selat Hormuz yang merupakan *choke point* terpenting ekspor minyak mentah dari kawasan.

Ancaman potensial ini tentu sangat bersifat semu, mengingat Iran tidak pernah benar-benar mengganggu rute perdagangan minyak di Selat Hormuz meskipun sejatinya wilayah itu masih masuk kedaulatannya. Kalaupun suatu saat Iran memutuskan untuk memblokir rute perdagangan minyak tersebut, itu hanya akan menjadi respon terhadap tindakan AS yang bersifat provokatif.

AS juga menganggap Iran sebagai ancaman terhadap kepentingan ekonominya karena insiden kapal tanker yang terjadi pada bulan Mei dan Juni 2019 lalu (CNN Indonesia, 2019). Meski AS menuduh Iran sebagai dalang di balik insiden tersebut, tuduhan itu masih tidak

didasari oleh bukti *valid*. Setelah itu, AS mengirim *drone* ke wilayah kedaulatan Iran dan *drone* itu ditembak jatuh. Disini AS dan Iran sama-sama melewati tahap dilema interpretasi dan keduanya menginterpretasikan satu sama lain sebagai ancaman.

Alhasil, terjadi dilema respon yang cenderung meningkatkan ketegangan antar kedua negara. Ini menciptakan terjadinya paradoks keamanan. Amerika Serikat memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk melancarkan serangan ekonomi terhadap Iran. Serangan tersebut bersifat mengancam Iran dan memperparah eskalasi tensi antar keduanya.

Kedua, ancaman strategis atau ancaman yang ditujukan kepada kepentingan AS untuk memerangi terorisme di kawasan. AS menyebut Iran sebagai negara pendukung teroris. Sebutan ini merujuk pada dukungan Iran terhadap Hizbullah dan Hamas. Iran sebagai negara dengan mayoritas Syiah tentu memiliki hubungan yang baik dengan umat Syiah di Libanon ditambah dengan oposisi keduanya terhadap Israel yang menjadi cikal bakal lahirnya Hizbullah. Meski merupakan salah satu sponsor terhadap Hizbullah, organisasi itu sesekali menyesali makin berkurangnya bantuan yang diberikan Iran (Gerges, 2002).

Hamas di sisi lain, walapun menerima dana dari beberapa ulama Iran, bantuan besar bagi mereka datang dari Palestina dan warga dari negara-negara Arab di Teluk. Hamas tidak menerima perintah dari Teheran. Mereka punya

agenda sendiri. Kemunculan kelompok non negara seperti Hizbullah dan Hamas sebenarnya mempunyai kaitan dengan Amerika dan Israel. Menurut Chomsky (2016), kedua gerakan ini muncul sebagai perlawanan terhadap agresi Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Kekerasan Israel jauh melampaui aksi kejahatan apapun yang dikaitkan dengan kedua organisasi ini.

Kedua aktor non-negara tersebut muncul sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap agresi Israel ke negara-negara Muslim. Di sisi lain, Amerika menghindari fakta bahwa Arab Saudi, sekutunya di kawasan, merupakan negara sponsor terorisme terbesar di dunia. *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) adalah organisasi yang disokong oleh sekutu AS tersebut.

Pandangan Iran sebagai pendukung terorisme sebenarnya datang dari dukungan pemerintahnya terhadap Hizbullah dan Hamas. Hal inilah yang kemudian membentuk persepsi AS terhadap Iran dan menjustifikasi penggunaan sanksi ekonomi AS yang terus-menerus terhadap Iran termasuk di masa pandemi Covid-19.

Ketiga, berkaitan dengan upaya AS dalam mewujudkan Timur Tengah sebagai kawasan bebas nuklir. Selama bertahun-tahun AS berusaha meyakinkan dunia bahwa program nuklir Iran bertujuan untuk menciptakan senjata. Inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*), sebelum akhirnya AS memutuskan untuk berhenti

berpartisipasi. Alasannya karena Iran telah menghentikan komitmennya terhadap kesepakatan itu dan sudah mulai mengembangkan senjata nuklir.

Namun, asumsi tersebut kontradiksi dengan bukti-bukti yang dikemukakan oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) selaku pihak yang berwenang memverifikasi ketaatan Iran. Bukti-bukti dari pihak lain juga bertolak belakang dengan tuduhan Trump terkait program nuklir Iran. Semua laporan dari PBB, Uni Eropa, IAEA, dan P5+1 mengindikasikan bahwa Iran telah mematuhi JCPOA. Menlu AS, Mike Pompeo pada 12 April 2018 melalui Komite Dewan Hubungan Luar Negeri juga menyatakan bahwa dia belum menemukan bukti terkait ketidaktaatan Iran terhadap kesepakatan tersebut (Kerr & Katzman, 2018).

Terakhir, berkaitan dengan ancaman Iran terhadap kepentingan strategisnya yang kontroversial, yaitu melindungi Israel dan memediasi perdamaian Arab-Israel. Tentu saja Israel menghadapi 'ancaman eksistensial' atas berbagai pernyataan Iran: Pemimpin Tertinggi Khamenei dan mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad kerap mengancam akan menimpakan kehancuran. Namun mereka tidak melakukannya – dan walaupun melakukannya, hanya berdampak kecil (Chomsky, 2016).

Iran bukan ancaman serius bagi Israel, walaupun secara militer mereka mencoba mengancam, mungkin tidak akan berarti. Mengingat kapabilitas militer Israel sendiri sudah sangat

memadai, belum dengan sokongan dan kehadiran militer AS di Israel dan kawasan. Dukungan Iran terhadap Hamas dan Hizbullah mungkin menghambat perdamaian Arab-Israel, namun memosisikannya sebagai satu-satunya faktor merupakan sebuah pandangan yang sempit dan terkesan dipolitisir.

### **Dampak Sanksi Ekonomi AS terhadap Iran di Tengah Pandemi Covid-19**

Di tengah memburuknya situasi pandemi Covid-19, hubungan AS-Iran pun kian memburuk. Iran telah secara terang-terangan menyatakan kesulitan dalam menangani peningkatan kasus infeksi virus di negaranya. Semua itu diperburuk dengan sanksi ekonomi AS yang terus menekan Iran. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Iran itu telah disampaikan oleh Menlu Iran Javad Zarif melalui akun *Twitter*-nya. Dalam cuitan di akun *Twitter*-nya, Zarif telah merincikan berbagai kebutuhan yang diperlukan oleh kementerian kesehatan mereka dalam memerangi Covid-19. Ini dimaksudkan untuk memberitakan kepada dunia tentang akibat dari sanksi ekonomi AS selama pandemi, sekaligus juga untuk meminta bantuan dari komunitas internasional.

Ironisnya, AS justru merespons permintaan tersebut dengan menambahkan deretan sanksinya terhadap Iran karena masih memandangnya sebagai ancaman terhadap kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Pada tanggal 19 Maret 2020, Kementerian Keuangan AS

menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Uni Emirat Arab karena membeli produk minyak dari Perusahaan Minyak Nasional Iran atau *National Iranian Oil Company (NIOC)*. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah: *Ras Al Khaimah-based Petro Grand FZE, Alphabet International DMCC, Swissol Trade DMCC, Alam Althrwaa General Trading LLC, dan Alwaneo LLC*. Alasan yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut “telah membantu Iran dalam membiayai proksi teroris seperti *IRGC Quds Force*, alih-alih membiayai kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan rakyat Iran” (Middle East Eye, 2020).

*IRGC Quds Force* sendiri merupakan salah satu divisi dari *IRGC* atau militer Iran yang melakukan berbagai aktivitas militer di wilayah negara-negara sekutu Iran. Salah satu yang paling terkenal adalah sokongan terhadap pemerintah Irak dan Suriah dalam memerangi *ISIS*. Pada tanggal 3 Januari 2020, Komandan Tertinggi *IRGC* yang juga bertanggung jawab atas *IRGC Quds Force*, Jenderal Qassem Soleimani tewas dalam serangan udara yang diluncurkan oleh AS setelah kunjungannya ke Irak.

Serangan tersebut ditujukan pada pesawat sipil yang ditumpangi Soleimani. Iran membalas kematian tersebut dengan menyerang pangkalan militer *Ain Al Assad* di Irak pada tanggal 8 Januari 2020. AS tidak memberikan balasan apa-apa terhadap serangan tersebut. Kendati demikian, dua hari kemudian, Menlu

Pompeo dan Menkeu Mnuchin mengumumkan sanksi baru terhadap ekspor logam Iran dan beberapa petinggi Iran (Macias & Breuninger, 2020).

Pada tanggal 26 Maret 2020, AS kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Kali ini, yang menjadi target adalah perusahaan-perusahaan Irak dan Iran yang disinyalir bekerja sama atau merepresentasikan *IRGC Quds Force* antara lain: *Reconstruction Organisation of the Holy Shrines in Iraq (ROHSI)* dan *The Cosar Company*, yang merupakan sebuah perusahaan yang terkait dengan *ROHSI*. *ROHSI* sendiri merupakan sebuah organisasi yang berdedikasi untuk membangun makam-makam para Wali atau Ulama Besar di Irak untuk dijadikan pusat perziarahan. Perusahaan yang juga terkena imbas dari sanksi AS adalah *Al Khamael Maritime Services*, sebuah perusahaan pelayaran yang berbasis di Irak. AS menuduh perusahaan tersebut telah memfasilitasi penjualan minyak Iran (Middle East Eye, 2020).

Pada bulan Mei 2020, pemerintah AS melarang warganya untuk berbisnis dengan sejumlah perusahaan yang masuk daftar hitam dan seluruh aset perusahaan tersebut di AS turut dibekukan. Kemenkeu AS juga mengumumkan bahwa sejumlah petinggi negara, salah satunya Menteri Dalam Negeri Iran, Abdolreza Rahmani Fazli dikenai tuduhan pelanggaran HAM (Macias, 2020). Sebelumnya, pada pertengahan bulan Maret 2020, Direktur Bank Sentral Iran sempat mengajukan pinjaman kepada *International Monetary Fund (IMF)*

sebesar 5 (lima) miliar dollar AS. Sebelumnya *IMF* telah menawarkan 'dana pinjaman darurat' kepada negara-negara yang terdampak pandemi sebagai bagian dari skema *Rapid Financing Instrument*. Jika meninjau dari sejarah, ini merupakan pertama kalinya Republik Islam itu mengajukan pinjaman sejak tahun 1979.

Namun, *IMF* tidak memberikan pinjaman tersebut. Semua itu tentu diakibatkan oleh posisi AS selaku pemegang saham terbesar *IMF* yang berkuasa dalam menentukan arah kebijakan badan dana internasional itu. Alasannya menurut Menlu Pompeo adalah bahwa Iran bisa saja mengalihkan dana pinjaman tersebut untuk 'menciptakan senjata pemusnah masal dan membiayai proksi terorisnya' (Aljazeera, 2019). Di sisi lain, upaya AS dalam menghalangi pemberian dana pinjaman *IMF* didasari pada tuduhan bahwa Iran sejatinya telah memiliki cukup dana untuk memerangi pandemi Covid-19.

Tudingan ini langsung dibantah keras oleh ekonom Ferial Mostofi, anggota dari *Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture (ICCIMA)*. Menurut pendapatnya, sebelum adanya pandemi Covid-19 pun Iran telah mengalami tekanan ekonomi, antara lain defisit anggaran sebagai dampak dari berkurangnya ekspor minyak akibat sanksi AS. Sekarang, dengan adanya pandemi Covid-19, kondisi ekonomi Iran kian memburuk dan yang paling penting lagi, Iran sangat membutuhkan dana pinjaman tersebut untuk memerangi

Covid-19 dan menyelematkan nyawa warga negaranya.

Meskipun pemerintah AS telah mengklaim bahwa makanan dan obat-obatan telah dikecualikan dari sanksi ekonomi mereka, fakta menunjukkan bahwa AS terus menjatuhkan sanksi unilateral secara kolektif sehingga menghalangi terjadinya hubungan dagang dengan Iran. Selain itu, lembaga keuangan di berbagai negara juga enggan untuk memproses transaksi yang berhubungan dengan Iran karena takut ikut terdampak sanksi AS yang merusak. Ini adalah penyebab utama terjadinya lonjakan drastis pada harga peralatan medis dan obat-obatan di Iran (Fallahi, 2020).

Merespons kondisi terkini, para pemimpin dunia dan diplomat asing telah mendesak pemerintah AS untuk meringankan sanksi kepada Iran. Perdana menteri Pakistan, Imran Khan, telah meminta Presiden Trump melalui cuitan *Twitter*-nya untuk melepaskan Iran dari sanksi ekonominya. Seruan serupa datang dari beberapa pemerintah negara Eropa. Sekjen PBB, Antonio Guterres, beserta Komisaris HAM PBB, Michelle Bachelet, juga menyerukan agar AS mempertimbangkan pelanggaran sanksi terhadap Iran.

Situs web resmi *Human Rights Watch* merilis berita pada tanggal 6 April 2020 bahwa Kantor Departemen Pengendalian Aset Asing atau *Office of Foreign Assets Control* (OFAC) Kemenkeu AS mengeluarkan panduan bahwa setiap transaksi yang melibatkan aset valuta asing Iran yang disimpan di luar negeri,

ketika digunakan untuk membeli barang-barang kemanusiaan, tidak akan menghadapi sanksi ekonomi AS. Kendati demikian, dengan tidak adanya keringanan untuk membeli minyak Iran disertai dengan berlanjutnya sanksi terhadap Bank Sentral Iran, alhasil akses warga Iran terhadap mata uang untuk membeli pasokan medis yang dibutuhkan di pasar internasional menjadi semakin dibatasi (Human Right Watch, 2020).

OFAC telah mengeluarkan lisensi umum yang memungkinkan ekspor “barang-barang makanan tertentu, obat-obatan, dan pasokan medis dasar ke Iran” tanpa memerlukan otorisasi khusus lanjutan. Ketentuan-ketentuan ini juga memberikan otorisasi transaksi keuangan guna menyokong impor barang-barang kategori ini dari AS atau dari negara pihak ketiga. Namun, pada kenyataannya lisensi umum ini hanya dibatasi hingga 500.000 dollar AS. Hal ini tentu saja masih menghambat upaya Iran dalam mengakses obat-obatan.

Selain itu, definisi obat-obatan di bawah peraturan ekspor AS—yang meliputi obat resep, obat bebas, dan alat kesehatan—tidak termasuk vaksin tertentu, produk biologi dan kimia, dan alat kesehatan termasuk instrumen, peralatan, ambulans yang dilengkapi perlengkapan, alat sterilisasi, dan kendaraan yang membawa peralatan pengujian medis. Ini berarti bahwa beberapa peralatan yang penting untuk memerangi virus, seperti peralatan dekontaminasi dan respirator lengkap, memerlukan lisensi khusus. Jika lisensi

yang lebih banyak tidak diberikan, atau aturan tidak diubah untuk memasukkan peralatan ini di bawah lisensi umum, Iran mungkin tidak dapat memperoleh peralatan medis dan obat-obatan yang mereka butuhkan untuk membantu memerangi kasus Covid-19 secara tepat waktu (Human Right Watch, 2020).

Melihat kondisi terbaru di AS, sepertinya dibawah kepemimpinan Joe Biden akan terjadi pemulihan demokrasi yang sebelumnya dianggap gagal oleh berbagai pihak pada masa kepemimpinan Trump. Ada kemungkinan partai yang sekarang berkuasa akan membatalkan kebijakan-kebijakan Trump yang dianggap paling buruk, termasuk sanksi ekonomi yang diberikan bagi Iran pada masa pandemi Covid-19 ini.

## KESIMPULAN

Tulisan ini menemukan bahwa AS semakin memperketat sanksi ekonominya terhadap Iran pada masa pandemi Covid-19. Padahal, Iran sangat kesulitan dalam memerangi penyebaran virus tersebut. Tindakan AS itu bukan tanpa sebab, melainkan karena AS masih melihat Iran sebagai ancaman terhadap kepentingan nasionalnya di kawasan Timur Tengah. Demi mengamankan kepentingan strategis dan ekonominya di kawasan, maka AS memanfaatkan salah satu *power*-nya untuk menekan Iran.

*Power* yang dimanfaatkan oleh AS adalah kekuatan dan pengaruh ekonominya, alih-alih kapabilitas militernya. AS tidak hanya menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan

asing yang berafiliasi dalam membantu pelayanan kesehatan rakyat Iran karena menganggap motif mereka adalah membiayai teroris, tapi AS juga menuduh beberapa petinggi Iran dengan tuduhan pelanggaran HAM dan memengaruhi IMF untuk tidak memberikan 'dana pinjaman darurat' kepada Iran.

Dampak paling nyata yang dirasakan oleh Iran akibat sanksi-sanksi AS adalah kesulitan pemerintah dalam memerangi Covid-19. Iran kesulitan dalam mendatangkan obat-obatan dan peralatan medis yang sangat penting dalam memerangi pandemi Covid-19. AS tahu bahwa kebijakan luar negerinya terhadap Iran telah benar-benar berdampak buruk bagi negara itu, namun AS masih memutuskan untuk mengesampingkan aspek kemanusiaan.

Melalui tindakan itu, AS sedang mengedepankan aspek *survival*, dimana AS hanya mengutamakan sanksi ekonomi terhadap Iran yang telah membuat Iran mengalami kesulitan dalam memerangi pandemi Covid-19. Di sisi lain, sanksi ekonomi AS terhadap Iran lebih diarahkan agar Iran melunak dalam negosiasi terkait program nuklirnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (25 September 2019). *U.S.-Iran Standoff: A Timeline of Key Events*. <https://www.aljazeera.com/news/2019/09/25/us-iran-standoff-a-timeline-of-key-events/>
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Kencana.

- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Chomsky, N. (2016). *Who Rules The World*. Bentang Saputra.
- Clawson, P. (11 Oktober 2010). *U.S Sanctions*. United States Institute of Peace. <https://iranprimer.usip.org/resource/us-sanctions>
- CNN Indonesia. (14 Juni 2019). *Kapal Tanker Diserang Dekat Iran, Harga Minyak Dunia Melonjak*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190614080127-85-403185/kapal-tanker-diserang-dekat-iran-harga-minyak-dunia-melonjak>
- Cooper, H. (20 Juni 2019). *What We Know About Iran Shooting Down a U.S. Drone*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2019/06/20/us/politics/drone-shot-down-iran-us.html>
- Fallahi, E. (26 April 2020). *Senior Businesswoman Dismisses U.S. Claim that Iran Doesn't Need IMF Loan*. Tehran Times. <https://www.tehrantimes.com/news/447194/Senior-businesswoman-dismisses-U-S-claim-that-iran-doesn-t-need>
- Fitzpatrick, M., Elleman, M., & Izewicz, P. (2019). *Uncertain Future: The JCPOA and Iran's Nuclear and Missile Programmes*. Routledge.
- Gerges, F. (2002). *Amerika dan Islam Politik: Benturan Peradaban atau Benturan Kepentingan?* Pustaka Alvabet.
- Human Rights Watch. (6 April 2020). *U.S. Ease Sanctions on Iran in Covid-19 Crisis*. <https://www.hrw.org/news/2020/04/06/us-ease-sanctions-iran-covid-19-crisis>
- Kerr, P. K., & Katzman, K. (2018). *Iran Nuclear Agreement and U.S. Exit*, Congressional Research CRS Report (1-35). <http://goodtimesweb.org/diplomacy/2019/R43333.pdf>
- Macias, A. (20 Mei 2020). *U.S. Targets Iran's Interior Minister in Latest Round of Sanctions*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/05/20/us-targets-irans-interior-minister-in-latest-round-of-sanctions.html>
- Macias, A., & Breuninger, K. (10 Januari 2020). *U.S. Slaps New Sanctions on Iran Following Strikes on U.S. Targets*. CNBC. <https://www.cnbc.com/2020/01/10/us-will-slap-new-sanctions-on-iran-following-strikes-on-us-targets.html>
- Middle East Eye. (19 Maret 2020). *U.S. Blacklists Five UAE-based Companies for Doing Business with Iran*. <https://www.middleeasteye.net/news/us-blacklists-uae-based-companies-doing-business-iran>
- Mortazavi, N. (3 April 2020). *Pressure Mounts on Trump to Ease Sanctions on Iran Amid Covid-19 Outbreak*. Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/pressure-mounts-on-trump-to-ease-sanctions-on-iran-amid-covid-19-outbreak/>

- Riza, B. (9 Mei 2019). 5 Poin dari Kesepakatan Nuklir Iran. Tempo. <https://dunia.tempo.co/read/1203564/5-poin-dari-kesepakatan-nuklir-iran/full&view=ok>
- Setiawan, A. (2018). *Dinamika Timur Tengah*. Leutikaprio.
- Statista. (2020). *Number of Coronavirus (Covid-19) cases in The Middle East and North Africa as of March 2020*. <https://www.statista.com/statistics/104699/mena-number-of-coronavirus-cases-by-country/>
- Takian, A., Raofi, A., & Kazempour-Ardebili, S. (2020). Covid-19 Battle During The Toughest Sanctions Against Iran, *The Lancet*, 395, 1035-1036.
- Tasnim News Agency. (9 Mei 2020). *Iran's Zarif Sends Letter to UN Chief on US Sanctions, Unilateralism*. <https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/05/09/2261818/iran-s-zarif-sends-letter-to-un-chief-on-us-sanctions-unilateralism>
- Usher, B.P. (7 November 2020). *Pemilu Amerika: Bagaimana Joe Biden Mengubah Kebijakan Luar Negeri Konfrontatif Trump?* BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54851305>

## TENTANG PENULIS

Meyland S.F. Wambrau adalah Dosen tetap pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih. Ia menyelesaikan studi S-2 (Ilmu Hubungan Internasional) dari Universitas Indonesia tahun 2017. Fokus kajian penelitian dari Meyland adalah ekonomi politik global, politik luar negeri, dan perusahaan multinasional.

Mathius Apintamon adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih. Pada saat penulisan artikel, Mathius berada pada semester terakhir.

## CARA SITASI ARTIKEL INI:

Wambrau, M.S.F., & Apintamon, M. (2021). Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 1(1), 56-72. DOI : 10.31957/pjdir.v1i1.1674